**ABSTRAK**

Pemberian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri berupaya untuk menjadikan setiap daerah lebih baik kedepannya. Hal yang dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Manado dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja pegawai mengeluarkan kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai kepada pegawai negeri sipil di luar gaji pokok. Sehubungan dengan itu, untuk mengetahui sejauh mana suatu penelitian dengan judul “**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KECAMATAN WANEA PEMERINTAH KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA”**

Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai, apa yang menjadi faktor penghambat serta upaya yang dilakukan pemerintah Kota Manado dalam optimalisasi dari penerapan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Wanea Pemerintah Kota Manado dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan yang didapatkan bahwasanya implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai di Kantor Kecamatan Wanea sudah dilaksanakan sesuai prosedur berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Manado namun belum mencapai sasaran yang diharapkan. Faktor penghambat diantaranya sumber daya manusia serta sarana prasarana yang belum memadai. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Manado untuk pengoptimalisasian kebijakan ini dengan melakukan inspeksi terhadap semua instansi yang ada dan meningkatkan jumlah besaran tambahan penghasilan pegawai. Saran penulis untuk implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai diantaranya Pemerintah Kota Manado harus lebih sering melakukan inspeksi, peningkatan sumber daya manusia dari segi kuantitas dan kualitas serta penggunaan *finger print* sebagai alat penunjang pelaksanaan kebijakan ini.

Kata Kunci : Implementasi, kebijakan, tambahan penghasilan pegawai